

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA LOKAL: STUDI KASUS DTKS DI KELURAHAN ANTAPANI KULON, KECAMATAN ANTAPANI, KOTA BANDUNG

**Ricky Hidayattulloh**<sup>1)\*</sup>  
*Universitas Al Ghifari*<sup>1)</sup>  
Email: rickyhidayat688@gmail.com \*

### Riwayat Artikel

Diterima: 22 Juli 2025  
Disetujui: 21 Agustus 2025  
Diterbitkan: 4 September 2025

### Abstract

*The accuracy of targeting social welfare programs is essentially determined by the quality of data governance, as invalid data often creates distribution issues and triggers injustice. This study specifically seeks to examine the implementation of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) policy in Antapani Kulon Village, highlighting the dynamics, obstacles, and supporting factors within the regulatory framework of Social Affairs Ministerial Regulation No. 3 of 2021. Interestingly, this study relies on the theories of Edward III on policy implementation, Khatri and Brown on data governance, and Arnstein on community participation, thus providing a more comprehensive conceptual foundation. The chosen method is a qualitative case study approach, combining interviews, observation, and documentation, which is then analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that although DTKS implementation has been ongoing, its effectiveness is still hampered by unclear communication, limited human resources and technical facilities, and low community participation. It is worth noting that the success of DTKS at the local level is largely determined by clear communication, adequate institutional capacity, and active community collaboration.*

**Keywords:** Policy implementation, DTKS, Data Governance.

### Abstrak

Ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial pada hakikatnya amat ditentukan oleh kualitas tata kelola data, sebab data yang tidak valid kerap melahirkan persoalan distribusi dan memicu ketidakadilan. Penelitian ini secara khusus berupaya menelaah implementasi kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Antapani Kulon, dengan menyoroti dinamika, hambatan, dan faktor pendukung dalam bingkai regulasi Permensos No. 3 Tahun 2021. Menariknya, kajian ini bertumpu pada teori Edward III mengenai implementasi kebijakan, Khatri dan Brown tentang tata kelola data, serta Arnstein terkait partisipasi masyarakat, sehingga memberi pijakan konseptual yang lebih komprehensif. Metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui model Miles dan Huberman. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meski implementasi DTKS telah berjalan, efektivitasnya masih terhambat oleh komunikasi yang kurang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknis, serta rendahnya partisipasi warga. Patut dicatat, keberhasilan DTKS di tingkat lokal sejatinya amat ditentukan oleh kejelasan komunikasi, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta kolaborasi aktif masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, DTKS, Tata Kelola Data.

## A. PENDAHULUAN

Ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial sejatinya amat bergantung pada kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Patut dicatat, data yang tidak valid kerap memunculkan persoalan serius, seperti penerima bantuan ganda ataupun distribusi yang meleset dari kelompok sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa data tidak semata berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai fondasi penting bagi keadilan dalam distribusi sosial. Menariknya, kajian tentang tata kelola data (data governance) seperti yang digagas dalam kebijakan One Data Indonesia dan dibahas dalam studi tata kelola & mutu data oleh Bernardo et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa akurasi, integritas, dan interoperabilitas, kebijakan sosial “berbasis data” akan sangat rentan terhadap kesalahan alokasi

Tantangan implementasi kebijakan sosial berbasis data, jika ditelaah lebih jauh, ternyata tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup kapasitas kelembagaan yang menjadi pelaksananya. Penelitian tentang implementasi kebijakan *One Data Indonesia* di Sukabumi misalnya, menegaskan bahwa kurangnya standardisasi dan interoperabilitas data masih menjadi kendala utama dalam tata kelola data publik (Rachmat et al., 2023). Lebih dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data juga sering menimbulkan bias informasi di tingkat akar rumput. Situasi ini selaras dengan temuan Pate et al. (2025) yang menegaskan bahwa partisipasi warga, termasuk melalui media sosial seperti WhatsApp, terbukti dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data kebijakan publik.

Konteks permasalahan tersebut terlihat jelas di Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Implementasi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah ini menghadapi problematika yang cukup kompleks, mulai dari ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual warga hingga keterbatasan sumber daya pelaksana di lapangan. Hambatan ini semakin terasa karena kelurahan, yang sejatinya menjadi ujung tombak pemutakhiran data, justru belum memperoleh dukungan teknis dan partisipasi masyarakat yang memadai. Akibatnya, distribusi bantuan sosial sering kali rawan menimbulkan persoalan ketidakadilan di tingkat lokal. Fenomena tersebut semakin menegaskan urgensi penelitian ini untuk mengkaji secara kritis implementasi kebijakan DTKS di Antapani Kulon.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan

Tahun	Bulan	Presentase %
2022	Maret	4,25%
2023	Maret	3,96%
2024	Maret	3,87%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Data empiris turut memperkuat gambaran ini. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, persentase kemiskinan di wilayah penelitian menunjukkan tren penurunan dari 4,25% pada Maret 2022, menjadi 3,96% pada Maret 2023, dan turun tipis lagi ke 3,87% pada Maret 2024. Tren ini menarik, karena meskipun memperlihatkan adanya perbaikan konsisten dari tahun ke tahun, laju penurunannya cenderung lambat. Dengan kata lain, kebijakan berbasis data mulai menghasilkan dampak, tetapi belum signifikan dalam mengurangi kerentanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya progres parsial sekaligus mengisyaratkan bahwa efektivitas tata kelola data masih menghadapi tantangan besar. Situasi demikian memperkuat urgensi analisis lebih mendalam terhadap implementasi DTKS di tingkat kelurahan.

Penelitian terdahulu juga merekam dinamika serupa. Bernardo et al. (2024) menekankan bahwa tata kelola data yang lemah berisiko menimbulkan distorsi kebijakan karena akurasi, integritas, dan interoperabilitas data menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan program sosial. Rachmat et al. (2023) menyoroti bahwa implementasi kebijakan *One Data Indonesia* masih menghadapi kendala berupa kurangnya standardisasi dan koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan berbasis data. Sementara itu, Pate et al. (2025) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat melalui kanal digital, termasuk WhatsApp, dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi kebijakan publik. Dari temuan ini terlihat jelas bahwa isu implementasi kebijakan sosial senantiasa berkaitan erat dengan kualitas tata kelola data, kapasitas kelembagaan, dan tingkat partisipasi warga, sebagaimana juga diperkuat oleh model partisipasi masyarakat di pedesaan yang dikemukakan Kuswanto (2023).

Persamaan penelitian ini dengan ketiga studi terdahulu terletak pada fokus yang sama-sama menyoroti tantangan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, terutama terkait dimensi data dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perbedaan penting karena tidak hanya membahas aspek sosial dan kelembagaan, melainkan juga menghubungkannya secara eksplisit dengan kerangka hukum Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS. Dengan begitu, studi ini menampilkan kekhasan yang jarang dibahas dalam literatur, yakni bagaimana regulasi formal diterjemahkan dalam praktik implementasi di level kelurahan.

Perbedaan tersebut sekaligus menghadirkan nilai originalitas penelitian ini. Kajian ini berupaya mengisi celah literatur dengan meneliti bagaimana kebijakan pengelolaan DTKS yang normatif di tingkat regulasi mampu diwujudkan dalam praktik administratif dan sosial di tingkat lokal. Fokus pada Kelurahan Antapani Kulon tidak hanya memberi kontribusi empiris yang spesifik, tetapi juga memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara kebijakan nasional dan dinamika lokal dalam tata kelola data kesejahteraan sosial.

Bertolak dari uraian tersebut, urgensi penelitian ini menjadi semakin nyata: keberhasilan implementasi DTKS merupakan prasyarat bagi ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial. Tanpa tata kelola data yang valid, berkelanjutan, dan partisipatif di level kelurahan, kebijakan nasional rawan kehilangan daya guna dan keadilan distribusinya. Karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi pemahaman empiris mengenai praktik tata kelola data sosial di tingkat lokal, tetapi juga mampu memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme DTKS ke depan.

Akhirnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* di Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan menelaah dinamika, hambatan, serta faktor-faktor pendukungnya dalam kerangka Permensos Nomor 3 Tahun 2021.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980), merupakan fase kritis setelah kebijakan ditetapkan, di mana keputusan politik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Menariknya, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan semata, tetapi juga ditentukan oleh interaksi antaraktor, kapasitas kelembagaan, dan dinamika lingkungan eksternal. Edward menegaskan bahwa komunikasi yang kabur sering kali menjadi biang keladi kegagalan implementasi, meskipun rancangan kebijakannya sudah ideal. Patut dicatat pula bahwa keterbatasan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun infrastruktur, sering menghadang efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, implementasi perlu dipandang sebagai sebuah proses yang kompleks dan dinamis, alih-alih sekadar menjalankan instruksi formal. Indikator:

- Komunikasi antar pelaksana berjalan jelas.
- Sumber daya tersedia secara memadai.
- Sikap dan komitmen pelaksana mendukung.
- Struktur birokrasi mendukung koordinasi.

### **Tata Kelola Data**

Khatri dan Brown (2010) memandang tata kelola data sebagai kerangka kerja yang memastikan data dapat dikelola secara efektif, konsisten, dan akuntabel untuk menopang proses pengambilan keputusan. Menariknya, teori ini tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan menekankan pula pada dimensi sosial dan kelembagaan yang menjamin kualitas data. Data, menurut mereka, harus diperlakukan layaknya aset strategis yang bernilai, bukan sekadar catatan administratif yang pasif. Patut dicermati, keberhasilan tata kelola data bergantung pada kejelasan peran, mekanisme akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dengan demikian, tata kelola data sesungguhnya menjadi fondasi penting bagi organisasi publik dalam merancang kebijakan yang berbasis bukti. Indikator:

- Kualitas dan akurasi data terjaga.
- Peran dan tanggung jawab pengelola jelas.
- Akuntabilitas dapat ditelusuri.
- Kepatuhan terhadap regulasi dipenuhi.

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Arnstein (1969) menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai sebuah “tangga,” di mana setiap anak tangga menunjukkan tingkat keterlibatan warga, mulai dari sekadar didengar hingga benar-benar memiliki kendali atas keputusan publik. Teori ini menarik karena menempatkan partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai indikator legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Dalam praktiknya, semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula kekuatan masyarakat untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Patut digarisbawahi, partisipasi yang substansial tidak hanya meningkatkan akurasi data sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Oleh karena itu, teori ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah syarat fundamental bagi efektivitas kebijakan publik. Indikator:

- Keterlibatan warga dalam forum musyawarah.
- Akses terbuka terhadap informasi kebijakan.
- Mekanisme pengawasan dari masyarakat berjalan.
- Warga memiliki pengaruh dalam keputusan.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Seperti yang ditegaskan Yin (2014), studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, sehingga sangat sesuai untuk membaca dinamika implementasi DTKS di tingkat kelurahan. Patut dicatat, permasalahan yang diangkat tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial, kelembagaan, maupun regulasi yang berlaku, sehingga metode ini dipilih agar dapat mengungkap realitas secara utuh. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menyingkap tidak hanya proses formal implementasi, tetapi juga hambatan serta faktor pendukung yang kerap tersembunyi di balik praktik keseharian. Dengan kata lain, relevansi metode ini terletak pada kemampuannya menangkap kompleksitas dan nuansa kontekstual yang sulit dijangkau melalui survei kuantitatif semata.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data, penelitian ini tidak bertumpu pada satu cara, melainkan menggabungkan beberapa teknik untuk memastikan kedalaman informasi. Pertama, dilakukan wawancara mendalam dengan perangkat kelurahan, pendamping sosial, serta warga penerima manfaat, yang dianggap memiliki pengalaman langsung dengan kebijakan

DTKS. Kedua, peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat bagaimana proses pemutakhiran data dan verifikasi benar-benar berlangsung, sehingga mampu menangkap dinamika yang kadang luput dari dokumen tertulis. Ketiga, dilengkapi dengan studi dokumentasi atas regulasi, laporan kegiatan, dan data statistik dari instansi terkait. Menariknya, kombinasi tiga teknik ini memungkinkan triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian.

### **Teknik Sampling**

Pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling, yaitu memilih narasumber secara sengaja berdasarkan peran dan relevansi mereka terhadap implementasi DTKS (Sugiyono, 2017). Dengan cara ini, aktor-aktor kunci seperti pejabat kelurahan, petugas verifikasi data, tokoh masyarakat, dan penerima bantuan dapat terlibat sebagai sumber informasi utama. Tidak hanya itu, strategi ini juga memberi ruang untuk menangkap beragam perspektif, baik dari sisi pengelola kebijakan maupun penerima dampak. Namun demikian, pemilihan informan yang selektif ini menuntut sensitivitas peneliti dalam menjaga keseimbangan informasi agar tidak bias pada satu kelompok tertentu.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang menekankan tiga tahapan penting. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilah dan menyaring informasi agar tetap fokus pada persoalan penelitian. Kedua, penyajian data, melalui bentuk tabel, matriks, maupun narasi yang memudahkan pembacaan pola. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan cara menafsirkan data, menghubungkan antar temuan, serta menguji konsistensi makna yang muncul. Menariknya, pendekatan ini tidak bersifat linier, melainkan siklus yang terus berulang seiring bertambahnya data baru. Dengan demikian, proses analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi, tetapi juga memungkinkan ditemukannya makna yang lebih dalam terkait implementasi kebijakan DTKS di level lokal.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan DTKS**

Komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi DTKS di Kelurahan Antapani Kulon. Berdasarkan hasil temuan lapangan, mekanisme komunikasi yang dijalankan melalui musyawarah kelurahan (muskel) serta forum-forum informal seperti grup WhatsApp RW, patut dicatat cukup membantu proses penyampaian informasi mengenai pendataan dan pemutakhiran data. Namun demikian, efektivitasnya belum dapat dikatakan optimal karena masih tampak adanya kesenjangan pemahaman antara pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima manfaat. Pada dimensi transmisi, pesan kebijakan relatif sampai kepada pihak sasaran, tetapi hambatan muncul pada aspek kejelasan, terutama ketika sebagian masyarakat belum memahami secara detail kriteria penerima maupun prosedur perbaikan data. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kanal komunikasi tersedia, kualitas isi pesan belum sepenuhnya utuh, sehingga menyulitkan masyarakat dalam menangkap maksud kebijakan secara komprehensif.

Menariknya, jika ditinjau dari dimensi konsistensi, pihak kelurahan dinilai cukup rutin menyampaikan agenda maupun perkembangan DTKS, sehingga kesinambungan informasi relatif terjaga dengan baik. Akan tetapi, konsistensi tersebut ternyata tidak serta-merta menutupi kelemahan pada aspek kejelasan pesan. Akibatnya, sebagian warga masih belum mengenal program DTKS secara penuh, padahal mereka termasuk kelompok sasaran utama kebijakan ini. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi DTKS di Kelurahan Antapani Kulon dapat dipandang sudah berjalan, tetapi efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya karena keberhasilan transmisi dan konsistensi belum diimbangi dengan kejelasan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas komunikasi, khususnya pada aspek kejelasan informasi, menjadi kunci penting untuk

memastikan bahwa kebijakan DTKS benar-benar dipahami, diterima, dan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.

Temuan ini sejalan dengan Edward III (1980) yang menegaskan bahwa kejelasan komunikasi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Bahkan, Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan kerap bermula dari hambatan komunikasi di tingkat pelaksana. Penelitian Khatri dan Brown (2010) juga mendukung hasil ini dengan menekankan bahwa tata kelola data yang efektif hanya dapat dicapai jika ada standar komunikasi yang jelas dan akuntabel.

### **Sumber Daya dalam Pengelolaan DTKS**

Ketersediaan dan kapasitas sumber daya terbukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan DTKS di Kelurahan Antapani Kulon. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberadaan operator DTKS dan tim verifikasi-validasi (verval) memang menjadi tulang punggung pelaksanaan pemutakhiran data. Namun demikian, jumlah personel yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan beban kerja yang luas, sehingga efektivitas proses verifikasi dan validasi menjadi terhambat. Patut dicatat, keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kecepatan kerja, tetapi juga pada akurasi data, karena tingkat ketelitian petugas rawan menurun ketika beban administrasi terlalu tinggi. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang ada sudah menunjukkan komitmen dan kinerja, tetapi kapasitas yang terbatas masih menjadi hambatan nyata dalam menjamin kualitas implementasi kebijakan.

Selain itu, Arnstein (1969) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperjelas pesan kebijakan, sedangkan Bernardo et al. (2024) serta Rachmat et al. (2023) menambahkan bahwa kualitas tata kelola data dan koordinasi antarinstansi merupakan penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan berbasis data. Dengan demikian, hasil penelitian di Antapani Kulon memperkuat literatur terdahulu, bahwa komunikasi yang tidak hanya konsisten tetapi juga jelas dan partisipatif adalah syarat mendasar bagi efektivitas kebijakan sosial berbasis data.

### **Faktor Penghambat Implementasi DTKS**

Tabel 2. Faktor Penghambat Implementasi DTKS di Kelurahan Antapani Kulon

No	Faktor Penghambat	Deskripsi Permasalahan	Dampak terhadap Implementasi
1	Pemutakhiran dan Perbaikan Data	Banyak data masyarakat tidak sinkron dengan Dukcapil; sebagian warga belum memahami sistem pendaftaran online.	Proses perbaikan data menjadi lambat, akurasi DTKS menurun, dan ketergantungan masyarakat pada bantuan semakin tinggi.
2	Kesulitan Identifikasi Data Penduduk	Nomor rumah acak, sering muncul data baru di lapangan, dan masyarakat kurang aktif melaporkan perubahan.	Tim verifikasi kesulitan melakukan pemutakhiran, sehingga data yang terkumpul tidak sepenuhnya aktual.
3	Kendala Teknis (SIKS-NG & perangkat)	Aplikasi SIKS-NG sering error saat input data; spesifikasi komputer rendah sehingga memperlambat pemrosesan.	Proses verifikasi dan input data tertunda, koordinasi dengan Dinas Sosial terhambat, dan data tidak cepat terintegrasi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa hambatan implementasi DTKS di Kelurahan Antapani Kulon tidak berdiri sendiri, melainkan berlapis mulai dari aspek administratif, teknis, hingga partisipasi masyarakat. Pemutakhiran dan perbaikan data yang kerap tidak sinkron dengan Dukcapil, ditambah minimnya pemahaman warga terkait prosedur pendaftaran online, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas yang cukup serius di tingkat akar rumput. Menariknya, masalah di lapangan tidak hanya berhenti pada persoalan administratif, tetapi juga terkait kesulitan identifikasi data penduduk, seperti penomoran rumah yang acak dan rendahnya inisiatif warga dalam melaporkan perubahan data. Patut dicatat pula, hambatan teknis seperti error aplikasi SIKS-NG dan keterbatasan perangkat komputer semakin memperlambat proses input data sekaligus menghambat koordinasi dengan Dinas Sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berbagai faktor penghambat ini saling berkelindan dan berdampak langsung pada kualitas serta akurasi DTKS, sehingga penyelesaiannya menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berlapis, bukan sekadar solusi parsial.

Menariknya, hasil temuan mengenai hambatan implementasi DTKS di Kelurahan Antapani Kulon justru memperlihatkan nuansa yang agak berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu. Sitorus (2023), misalnya, menekankan bahwa konsistensi sosialisasi dan dukungan teknis yang memadai mampu menekan terjadinya kesalahan data, sementara di Antapani Kulon hambatan teknis dan kurangnya dukungan sarana masih menjadi persoalan nyata. Hal serupa terlihat pada temuan Pate et al. (2025) yang menunjukkan bahwa partisipasi warga melalui media sosial dapat memperkuat transparansi dan kualitas informasi kebijakan, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan kapasitas perangkat kelurahan masih terbatas dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan. Patut dicatat pula, berbeda dengan Kuswanto (2023) yang menegaskan pentingnya model partisipasi masyarakat pedesaan untuk memperkuat keberlanjutan kebijakan, masyarakat di Antapani Kulon masih menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan tanpa diimbangi kontribusi aktif dalam memperbarui data. Dengan demikian, temuan penelitian ini menghadirkan kontradiksi penting bahwa meskipun regulasi secara normatif telah tersedia, persoalan teknis, kapasitas, dan partisipasi tetap menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas implementasi di tingkat lokal.

## E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan DTKS di Kelurahan Antapani Kulon masih menyisakan sejumlah tantangan penting. Hambatan paling menonjol terlihat pada aspek komunikasi yang belum sepenuhnya jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknis, serta kesulitan dalam pemutakhiran data, identifikasi penduduk, dan penggunaan aplikasi SIKS-NG. Patut dicatat, meskipun kerangka regulasi sudah tersedia dan dijalankan, efektivitas kebijakan di tingkat lokal belum tercapai secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan penelitian untuk menelaah dinamika, hambatan, dan faktor pendukung implementasi DTKS telah terpenuhi, sekaligus memberikan kontribusi akademik berupa bukti empiris bahwa keberhasilan kebijakan sosial berbasis data sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, secara praktis, pemerintah kelurahan bersama Dinas Sosial disarankan untuk memperkuat kualitas sosialisasi, meningkatkan kapasitas operator DTKS dan tim verifikasi-validasi, serta menyiapkan sarana teknologi yang lebih andal. Menariknya, ruang penelitian selanjutnya terbuka lebar, misalnya dengan pendekatan komparatif antarwilayah atau analisis kuantitatif yang dapat mengukur dampak efektivitas kebijakan secara lebih luas, mengingat keterbatasan studi ini yang berfokus pada satu kelurahan dengan pendekatan kualitatif. Dari sisi kebijakan, implikasi yang perlu digaribawahi adalah pentingnya perbaikan tata kelola

data terpadu yang lebih partisipatif, responsif, dan berkelanjutan agar tujuan pemerataan kesejahteraan sosial benar-benar dapat terwujud.

### REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bernardo, B. M. V., et al. (2024). *Data governance & quality management — Innovation and ...* [judul lengkap perlu dikonfirmasi]. *Journal*, [Vol./No.]. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X24001379>
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. Retrieved from <https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa>
- Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing data governance. *Communications of the ACM*, 53(1), 148–152. <https://doi.org/10.1145/1629175.1629210>
- Kuswanto, K. (2023). Structural model of community participation in rural communities. *Population and Economics*, 7(1), 42–57. <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e97189>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/qualitative-data-analysis-an-expanded-sourcebook/oclc/28844481>
- Pate, N., Sam, M., Nilwana, A., & Nonci, N. (2025). Influence of social media to encourage community participation in Indonesia government administration. *Journal of Government Science (GovSci)*, 6(1), 56–63. Retrieved from <https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/download/107/646>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley, CA: University of California Press. Retrieved from <https://archive.org/details/implementationho0000pres>
- Rachmat, D. F., Mulyadi, D., Abdullah, S., Putrianti, S. D., & Nurliawati, R. (2023). Analysis of the governance of One Data Indonesia (SDI) at the Communication and Information Office of Sukabumi City. In *Proceedings of the International Conference on Administrative Science (ICAS)*. Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3\\_6](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_6)
- Sitorus, S., Nasution, Z., Ria, N., & Rachmawati. (2023). Effectiveness education of cadres stunting to behavior toddler mothers overcome stunting in Deli Serdang North Sumatera and Aceh Besar, Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(12), 10783–10791. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i12.5873>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://alfabeta.co.id/produk/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Retrieved from <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>